

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis jabatan memegang peran yang sangat penting dalam ruang lingkup instansi pemerintah, karena digunakan untuk memetakan jabatan yang ada, memberikan informasi jabatan kepada pegawai serta untuk menata kebutuhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 1 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bahwa "Setiap instansi pusat dan instansi daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN".

Salah satu instansi pemerintah daerah yang belum menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 dengan ideal ialah Dinas Sosial Kota Makassar, karena Dinas Sosial Kota Makassar tidak memiliki tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga yang menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja ialah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang menyebabkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar ialah hanya jabatan penata keuangan saja dan analisis beban kerja jabatan ASN lainnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2020 karena masih menggunakan pedoman peraturan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang lama yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011. Serta semua jabatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian dan jabatan lainnya belum memiliki analisis jabatan.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Makassar, hal ini terjadi karena Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Makassar tidak terlalu memahami terkait cara membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 sehingga membuat dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan penata keuangan serta jabatan ASN lainnya dengan menggunakan pedoman yang lama.

Berdasarkan dokumen absensi pegawai yang diperoleh peneliti saat melaksanakan kegiatan penelitian pada bulan Juni 2022, berikut adalah data jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Makassar:

Tabel 1
Data Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022

No.	Nama Jabatan/Bidang	Jenis Pegawai		Jumlah Pegawai
		ASN	Tenaga Kontrak	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Subbagian Umum dan Kepegawaian	5	6	11
4.	Subbagian Keuangan	2	4	6
5.	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	2	2	4
6.	Kepala UPT	1	-	1
7.	Kepala Tata Usaha RPTC	1	-	1
8.	Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial	13	28	43
9.	Bidang Rehabilitasi Sosial	9	10	19
10.	Bidang Pengendalian BJKS	6	10	16
11.	Bidang Organisasi Sosial	5	3	8
Total Pegawai		46	63	108

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Makassar serta data peta jabatan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022, peneliti memperoleh data nama jabatan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unit yang menjadi fokus lokus dari peneliti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Data Nama Jabatan ASN Subbagian Umum & Kepegawaian Tahun 2022

No.	Nama Jabatan
1.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
3.	Pengelola Kepegawaian
4.	Analisis Sistem Informasi
5.	Pengadministrasi Surat
6.	Pengemudi

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2022.

Data diatas menunjukkan jumlah jabatan ASN yang ada pada Subbagian Umum dan Kepegawaian yang perlu untuk dibuatkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020.

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Sosial Kota Makassar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana rancangan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Sosial Kota Makassar?”.

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah untuk merealisasikan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pegawai Subbagian Umum dan Kepegawaian dapat mengetahui deskripsi pekerjaan masing-masing sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugasnya serta pekerjaan berjalan dengan baik.